

**HUBUNGAN ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI
DAERAH, BELANJA PEMBANGUNAN DAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH**
(Studi pada Kabupaten/Kota di Kalimantan)



SKRIPSI

Oleh :

Nama : ALI AKBAR ZULFIKAR

Nomor Mahasiswa : 04312045

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2008

**HUBUNGAN ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI
DAERAH, BELANJA PEMBANGUNAN DAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(Studi Pada Kabupaten/Kota di Kalimantan)**

SKRIPSI

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 jurusan Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi UII**

Oleh :

Nama : ALI AKBAR ZULFIKAR

Nomor Mahasiswa : 04.312.045

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

YOGYAKARTA

2008

PERNYATAAN BEBAS PLAGIATISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima sanksi/hukuman apapun sesuai peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, November 2008

Penyusun,

(Ali Akbar Zulfikar)

**HUBUNGAN ANTARA PERTUMBUHAN EKONOMI
DAERAH, BELANJA PEMBANGUNAN DAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(Studi Pada Kabupaten /Kota di Kalimantan)**

Hasil Penelitian

Diajukan oleh :

Nama : Ali Akbar Zulfikar

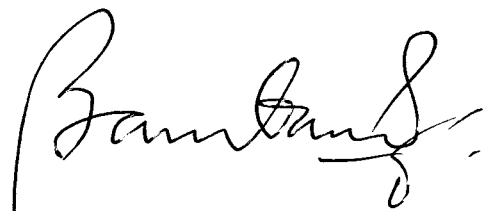
Nomor Mahasiswa : 04.312.045

Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal : 12 November 2008

Dosen Pembimbing,



(Drs. Kesit Bambang Prakosa, M. Si.)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

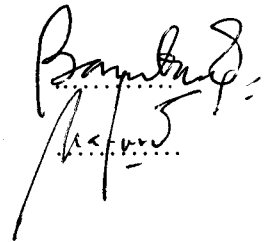
**Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja
Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada
Kabupaten/Kota di Kalimantan)**

Disusun Oleh: ALI AKBAR ZULFIKAR
Nomor Mahasiswa: 04312045

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 15 Desember 2008

Pembimbing Skripsi/Penguji : Drs. Kesit Bambang Prakosa, M.Si

Penguji : Mahmudi, SE, M.Si, Ak



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Asriyati, M.Bus, Ph.D

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb,

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga para sahabat dan para pengikutnya. Tak ada kata yang lebih pantas dari pada pujian dan ungkapan rasa syukur kepada-Nya karena hanya atas kehendak-Nya saya bisa menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pandapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan)”

Tulisan ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Tulisan ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan dan semangat selama masa perkuliahan :

1. Bapak Drs. Asma'i Ishak, M.Bus.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu. Dra. Erna Hidayah, M.Si, Akt, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Drs. Kesit Bambang Prakosa, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Syamsul Hadi, MS., Ak., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen FE UII yang telah memberikan bekal ilmu kepada saya selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. Papa, almarhumah Mama, dan adikQ farid serta seluruh keluarga tercinta yang senantiasa berdoa, memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Moehi '04: Rifki 'ram3x', Bayu 'gadul', Dicky 'gambiz', Afan 'botak', Adi 'Nukie2', Isa 'ceplink', Rizky 'tekek', Nino 'iteng', Chaidir 'umbu', Fian 'yanto kimpul', Rudi 'bebek', Jayen 'tuwo', Erik 'slamet', Dimas 'pantek', Raga 'bagong', Ivan 'cebol', Stevia, Ayu, Tia, Farah.
8. FE UII: Fuad, Adri, Mleng2, Arifin, Gembul, Palguno, Arek, Gontheng, Be2r, Galih, Topeng, Andam, Anshor, Snake, Peju, Doni S,Oji, Dani Tirta, Arum, liesa, Reta, Devi, Ayu, Dika babi, Ucup'syahriel', Kuntet, teman-teman angkatan 99-2006 dan seluruh warga FE UII yang selalu menemaniku, "All the best for you".
9. Semua orang yang saya kenal yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Thank's for all.

Saya menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan dan kemampuan yang saya miliki, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Penulis

(Ali Akbar Zulfikar)

MOTTO

“Jadi orang penting itu baik tapi lebih penting jadi orang baik”

“Jadikanlah hidupmu sebagai ibadah, niscaya hidupmu takkan sia-sia”

Allah tidak bakal menunda ajal seseorang yang telah tiba saatnya. Allah Maha

Mengetahui akan segala yang kamu lakukan (Q.S Al Munaafiquun 11)

DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiatisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Kata Pengantar.....	vi
Halaman Motto.	ix
Halaman Persembahan.....	x
Daftar Isi	xi
Daftar Tabel	xiii
Daftar Lampiran	xiv
Abstrak	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Pembahasan	7
BAB II LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Belanja Daerah.....	9
2.1.1 Belanja Rutin	11
2.1.2 Belanja Pembangunan	11
2.2 Pendapatan Asli Daerah	12
2.2.1 Pajak Daerah.....	13
2.2.2 Retribusi Daerah.....	15
2.2.3 Bagian Laba Usaha Daerah.....	17
2.2.4 Lain-lain Pendapatan yang Sah.....	17
2.3 Pertumbuhan Ekonomi Daerah.....	17
2.4 PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).....	19
2.5 Penelitian Terdahulu dan Penarikan Hipotesis	17
2.5.1 Peranan Belanja Pembangunan dalam Desentralisasi Fiskal.....	22
2.5.2 Arti Pertumbuhan Daerah bagi Kemandirian Daerah	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Populasi dan Sampel	27
3.2 Data dan Sumber Data	23
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	28
3.3.1 Belanja Pembangunan	28
3.3.2 Pendapatan Asli Daerah	29
3.3.3 Pertumbuhan Ekonomi Daerah	29
3.3.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	30
3.3.5 Pengukuran Variabel.....	31

3.4 Model Penelitian	25
3.5 Metode Analisis Data.....	33
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN	38
4.1 Analisis Deskriptif	38
4.2 Analisis Statistik	39
4.2.1 Analisis Regresi Linier Sederhana.....	40
4.2.1.1 Pembahasan Hipotesis Pertama	41
4.2.1.2 Pembahasan Hipotesis Kedua	43
4.2.1.3 Pembahasan Hipotesis Ketiga	44
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	52
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Keterbatasan Penelitian	54
5.3 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	58

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	39
Tabel 4.2 Hasil Analisi Regresi Linier Sederhana.....	40
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Multikolinearitas.....	48
Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Uji Heteroskedasitas.....	49
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Uji Autokorelasi.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Ringkasan Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Tahun Anggaran 2001-2006	58
--	----

LAMPIRAN 2

Ringkasan Realisasi Laju PDRB Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Tahun Anggaran 2002-2006.....	59
---	----

LAMPIRAN 3

Ringkasan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Tahun Anggaran 2001-2006	61
---	----

LAMPIRAN 4

Analisis Regresi Sederhana Pengaruh BD Terhadap Laju PDRB	63
---	----

LAMPIRAN 5

Analisis Regresi Sederhana Pengaruh BD Terhadap PAD	64
---	----

LAMPIRAN 6

Analisis Regresi Berganda Pengaruh Laju PDRB Terhadap PAD	65
---	----

LAMPIRAN 7

Hasil Uji Multikolinearitas.....	66
----------------------------------	----

LAMPIRAN 8

Hasil Uji Heteroskedasitas 1.....	66
-----------------------------------	----

LAMPIRAN 9

Hasil Uji Heteroskedasitas 2	66
------------------------------------	----

LAMPIRAN 10

Hasil Uji Heteroskedasitas 3	67
------------------------------------	----

LAMPIRAN 11

Hasil Uji Normalitas..... 67

LAMPIRAN 12

Hasil Analisis Deskriptif 68

ABSTRAK

Desentralisasi fiskal memberikan banyak keuntungan bagi daerah untuk mengelola kemampuan fiskal mereka sendiri. Pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi karena pemerintah daerah memiliki keuntungan mengenai informasi yang menyangkut alokasi sumber daya. Pemerintah daerah berada di tempat yang lebih baik untuk menyediakan barang dan jasa publik yang paling mendekati kebutuhan local.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak dari perubahan struktur belanja terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah. Selain itu, juga bertujuan untuk menguji efek langsung dan tidak langsung dari perubahan belanja modal terhadap pendapatan asli daerah.

Dalam hubungannya dengan perubahan struktur belanja modal, penelitian ini menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terpengaruh secara signifikan. Selain itu, juga menemukan bahwa keputusan pemerintah untuk mengalokasikan lebih banyak belanja modal untuk mendukung infrastruktur pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan pendapatan asli daerah yang lebih besar.

Kata kunci : *Desentralisasi Fiskal, pertumbuhan ekonomi, belanja modal, dan pendapatan asli daerah.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan pemerintah daerah, baik ditingkat propinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004. Kedua UU ini mengatur tentang *Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pamarintahan Daerah*. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah (pemda) dikarenakan pemda memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif.

Dalam UU No 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah, pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagian dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Selain dari Dana Perimbangan tersebut, pemerintah daerah juga mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan dan lain-lain Pendapatan.

Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Seharusnya dari transfer dari pemerintah pusat digunakan

secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik serta disajikan secara transparan dan akuntabel mengingat maksud dan tujuan dari transfer itu sendiri adalah sebagai pemerataan kemampuan fiskal suatu daerah atau menutup kesenjangan karena kebutuhan daerah ternyata melebihi potensi daerah itu sendiri.

Namun pada praktiknya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber utama bagi pemerintah daerah. Transfer dari pemerintah pusat untuk pelaksanaan pembangunan pemerintah daerah sangatlah besar. Mengingat tingginya jumlah transfer yang diberikan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah maka ada kemungkinan bahwa jika terjadi perubahan dalam transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka akan terjadi perubahan pada kemampuan daerah dalam hal keuangan yang nantinya akan berimbas pada jumlah belanja yang mampu dikeluarkan untuk keperluan daerah.

Transfer antarpemerintah merupakan fenomena umum yang terjadi di semua negara terlepas dari sistem pemerintahannya (Fisher, 1996) dan bahkan menjadi ciri yang paling menonjol dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah (Nemec dan Wright, 1997). Pada prinsipnya, tujuan utama implementasi transfer adalah mengurangi ketidakseimbangan fiskal baik secara horizontal maupun secara vertikal. Sungguhpun demikian, alokasi transfer di negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja tetapi kurang memperhatikan kemampuan pengumpulan pajak lokal (Naganathan dan Sivagnanam, 1999). Akibatnya, dari tahun ke tahun pemerintah daerah selalu

menuntut transfer yang lebih besar lagi dari pusat (Shah, 1994), bukannya mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih optimal (Oates, 1999).

Keadaan tersebut juga ditemui pada kasus pemerintah daerah kota dan kabupaten di Indonesia. Data menunjukkan proporsi pendapatan asli daerah (PAD) hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20 persen. Bahkan, kenyataan tersebut terjadi baik pada era sebelum maupun sesudah era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang terus berkembang, pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan mampu membiayai belanja pemerintah daerah kota dan kabupaten sebagai titik berat otonomi. (Haryo Kuncoro,2006)

Pada dasarnya Pendapatan Asli Daerah dan transfer dari pemerintah pusat yang berupa dana perimbangan merupakan sumber dana terbesar yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam pembiayaan pembangunan dan biaya operasional sehari-hari Pemerintah Daerah. Namun, pada prakteknya transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber dana utama yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi utamanya, yang oleh Pemerintah Daerah dilaporkan dalam perhitungan APBD. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi (kalau tidak mungkin menghilangkan) kesenjangan fiskal antara daerah dan menjamin tercapainya Standar Pelayanan publik Minimum di seluruh Negeri (Simanjuntak dalam sidik etal,2002).

Di Amerika Serikat, presentasi transfer seluruh pendapatan mencapai 50% untuk Pemerintah Federal dan 60% untuk Pemerintah Daerah (Fischer, 1996). Khusus di Negara-negara bagian Wisconsin di Amerika Serikat, terbesar 47%

pendapatan Pemerintah Daerah berasal dari transfer Pemerintah Pusat (Deller Et al,2002). Di Indonesia, pada dekade 1990 an persentase ini mencapai 72% pengeluaran provinsi dan 86% pengeluaran Kabupaten / Kota.

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU No. 32 tahun 2004). Inti hakekat otonomi adalah adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian (Saragih, 2003).

Kebijakan pelaksanaan desentralisasi fiskal dilakukan pada saat kurang tepat mengingat hampir seluruh daerah sedang berupaya melepaskan diri dari krisis ekonomi yang dimulai pertengahan 1997 (Saragih, 2003). Akibatnya kebijakan ini memunculkan kesiapan (fiskal) daerah yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kebijakan ini justru dilakukan pada saat terjadi disparitas pertumbuhan (ekonomi) yang tinggi.

Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001). Daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat. Rendahnya kapasitas ini mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang rendah. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif.

Pergesaran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) setempat dalam rangka meningkatkan tingkat

kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Kestinambungan pembangunan daerah relatif dukungan yang tinggi.

Perubahan alokasi belanja ini juga ditujukan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi ini. Wong (2004) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah.

Penulisan tugas akhir ini merupakan penelitian ulang atau replikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pada penelitian-penelitian sebelumnya sampel-sampel yang digunakan sudah mencakup Pulau Jawa dan Bali. Sampel yang digunakan pada skripsi ini adalah Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan dan periode yang diambil adalah tahun 2001-2006, sehingga skripsi ini berjudul :

“Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dampak belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemandirian daerah ?
2. Bagaimanakah dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kemandirian daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya adalah :

1. Bagi para aparat pemerintahan, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat memilah belanja pembangunan menurut sektornya dan melihat dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Bagi peneliti yang tertarik pada bidang kajian ini dapat menjadi referensi dan data tambahan untuk melakukan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

1.5 Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang penggambaran teori yang melandasi penelitian ini meliputi; Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan, hasil penelitian terdahulu, dan formulasi hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Terdiri dari populasi dan sample, data dan sumber data, variabel penelitian dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pembahasan secara rinci tentang analisis data serta pembahasan hasil yang diperoleh secara teoritik baik secara kuantitatif dan statistik.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Otonomi Daerah, dimana yang dimaksud otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. UU tersebut mencerminkan bahwa setiap daerah di Indonesia ini mempunyai wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri tanpa bergantung kepada pemerintah pusat. Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa tiap daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam melaksanakan aktivitas pembangunan di daerahnya masing-masing, yaitu dalam mengelola dan mengatur segala bentuk penerimaan dan pengeluaran tanpa campur tangan dari pemerintah pusat.

Bukannya tanpa celah dan kelemahan, otonomi daerah rupanya juga menimbulkan masalah bagi pemerintah di daerah. Hal tersebut berkaitan dengan kesiapan-kesiapan yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah tersebut. Keberhasilan otonomi daerah bergantung kesiapan-kesiapan, baik keuangan dan non keuangan atau sumber daya manusia yang dimiliki. Kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah dalam mengelola keuangannya secara maksimal akan berujung pada berjalannya otonomi daerah sesuai apa yang diinginkan. Aspek keuangan terdiri atas penerimaan yang pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Dan pengeluaran yang berbentuk Belanja Daerah.

2.1 Belanja Daerah

Era otonomi daerah yang menitikberatkan peranan pemerintah daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakatnya ternyata telah menggeser paradigma pembangunan yang selama ini diterapkan, yang semula terfokus di pusat kini daerahpun dapat sedikit lebih leluasa ikut andil dalam pembangunan daerah.

Implikasi dengan adanya otonomi daerah ini, mengakibatkan adanya *sharing of power* dan sekaligus *sharing of financial*. *Sharing of power* dapat dicermati dengan adanya ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan *sharing of financial* dapat dicermati pada ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Di dalam ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 sendiri diatur beberapa aspek yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu yang diatur dalam ketentuan ini adalah permasalahan belanja daerah. Menurut UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Belanja Daerah diartikan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Dan rinciannya dapat dibagi dalam dua bentuk yakni berdasar sifat dan berdasar fungsinya. Berdasar sifat ekonominya belanja daerah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, subsidi, hibah dan bantuan sosial. Sedangkan berdasarkan fungsinya belanja daerah terdiri dari belanja untuk pembangunan perumahan dan fasilitas umum, peningkatan kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial.

Beberapa pakar memiliki pendapat yang berbeda dengan UU yang ada mengenai bentuk-bentuk atau elemen-elemen belanja daerah. Perbedaan tersebut adalah dalam hal pengklasifikasian. Salah satunya adalah menurut Mardiasmo (2002), elemen-elemen yang termasuk dalam Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Aparatur Daerah, terdiri dari : Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, Belanja Modal/Pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat (publik).
2. Belanja Pelayanan Publik, terdiri dari : Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, Belanja Modal/Pembangunan yang dialokasikan atau digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dampak dinikmati oleh masyarakat (publik).
3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Pengeluaran uang dengan kriteria :
 - a. Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti layak terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan.
 - b. Tidak mengharap dibayar kembali pada masa yang akan datang, seperti yang diharapkan pada suatu pinjaman.
 - c. Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan seperti layak yang diharapkan pada kegiatan investasi.

4. Belanja Tak Tersangka, seperti :
 - a. Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian yang dapat membahayakan daerah.
 - b. Utang (pinjaman) periode sebelumnya yang belum diselesaikan dan atau yang tersedia anggarannya pada tahun yang bersangkutan.
 - c. Pengembalian penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang dibebaskan (dibatalkan) dan atau kelebihan penerimaan.

Namun pada praktiknya belanja pemerintah daerah dibagi dalam 2 bentuk seperti yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja daerah, yakni sebagai berikut :

2.1.1 Belanja Rutin

Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah daerah membutuhkan beberapa kebutuhan pokok yang sifatnya rutin atau terus-menerus namun umumnya tidak menghasilkan wujud fisik. Sebagai contoh belanja gaji dan honorarium pegawai. Pemerintah mengeluarkan belanja gaji dan honorarium pegawai yang sifatnya rutin setiap bulan untuk menggaji pegawai tetap dan memberikan honorarium bagi pegawai tidak tetap. Selain itu juga terdapat belanja perjalanan dinas untuk membiayai perjalanan dinas pegawai dalam menjalankan urusan pemerintahan ke daerah lainnya dan juga terdapat belanja barang dan belanja lain-lain.

2.1.2 Belanja Pembangunan

Selain dari belanja rutin pemerintah juga mengeluarkan belanja yang sifatnya tidak rutin dan umumnya menghasilkan wujud fisik yang

manfaatnya lebih dari satu tahun. Belanja pembangunan dikeluarkan oleh pemerintah yang mana manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat karena memang belanja pembangunan dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan publik. Sebagai contoh belanja untuk pembangunan jalan, gedung-gedung sekolah, rumah sakit, pembangunan jembatan dan sebagainya. Kesemuanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, salah satu bentuk penerimaan daerah adalah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada era sebelum otonomi daerah dimana sistem pemerintahan masih berbentuk sentralisasi ternyata membawa dampak yang kurang baik pada pembangunan daerah. Hal ini dapat terlihat dengan terhambatnya kebebasan daerah dalam mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh daerahnya dan dampak lain yang tak kalah merugikannya adalah tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan besarnya andil dan intervensi yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap jalannya pemerintahan di tiap daerah.

Dan kini setelah era otonomi daerah, sistem pemerintahan tidak lagi berupa sentralisasi namun telah berupa desentralisasi. Artinya daerah telah memiliki kewenangan untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Dalam pelaksanaannya daerah harus lebih mandiri dalam mengelola segala bentuk penerimaan dan pengeluarannya. Untuk dapat

menjalankan pemerintahannya pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

Namun banyak pihak yang masih salah kaprah mengenai otonomi daerah. Banyak pihak yang beranggapan bahwa otonomi daerah berarti setiap kebutuhan daerah harus dapat ditutupi dengan pendapatan asli daerah. Dan dampak dari kesalahan tersebut adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan meningkatkan pungutan pajak dan retribusi yang mana hal ini tentu sangat memberatkan bagi masyarakat daerah itu sendiri.

Pemahaman seperti itu sebenarnya kurang tepat. Otonomi daerah bukan berarti eksploitasi daerah dengan menghasilkan pendapatan asli daerah yang setinggi-tingginya. Jika otonomi daerah diartikan sebagai eksploitasi pendapatan asli daerah maka masyarakat daerahlah yang pada akhirnya yang akan terbebani (Mardiasmo, 2002).

Secara garis besar pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari pungutan daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UU No 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Yang akan diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 Pajak Daerah

Dalam menjalankan pemerintahan di daerah, daerah memerlukan sumber penerimaan yang diperoleh dari daerah. Salah satunya adalah dalam bentuk pajak daerah. Secara umum pajak dapat diartikan

sebagai suatu pungutan yang dilakukan oleh negara kepada warga negaranya dan sifatnya adalah memaksa. Secara lebih spesifik Sri Suranta dan Muhammad Syarifurrahman (2005) menjelaskan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi/badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah ditetapkan dengan Undang-undang namun pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah dan pihak yang berwenang memungut pajak daerah adalah Pemerintah Daerah. Widiyanto (2004) mengklasifikasikan kembali pajak daerah menurut wilayah pemungutannya, yakni :

1. Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - g. Pajak Parkir

2. Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Propinsi, terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air (PKB&KAA)
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air (BBNKB&KAA)
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT&AP)

2.2.2 Retribusi Daerah

Bentuk lain dari pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Selain dari pajak daerah, retribusi daerah adalah penyumbang pendapatan asli daerah yang terbesar di hampir setiap daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Kesit Bambang Prakosa, 2003).

Sejalan dengan pajak daerah, retribusi daerah juga ditetapkan dengan Undang-undang dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah dan yang berhak memungut adalah pemerintah daerah. Hal ini dapat kita lihat dari adanya perbedaan besarnya retribusi dan biaya parkir di tiap daerah karena Peraturan Daerah yang ditetapkan berbeda antara daerah yang satu dan yang lainnya.

Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok besar yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan (PP No 6 Tahun 2001 dalam Widiyanto, 2004). Yang mana dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan, kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi/badan, seperti retribusi atas pelayanan kesehatan, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor dan lain-lain.
- b. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta, seperti retribusi atas pemakaian kekayaan daerah, terminal, tempat pelelangan, tempat khusus parkir dan lain-lain.
- c. Retribusi perizinan adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasaranan, sarana/fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan misalnya, retribusi atas izin mendirikan bangunan, izin trayek, izin gangguan dan lain-lain.

2.2.3 Bagian Laba Usaha Daerah

Selain pajak dan retribusi sumber pendapatan asli daerah adalah berasal dari bagian laba usaha daerah yang terdiri dari bagian laba, deviden dan penjualan saham milik daerah. UU mengizinkan daerah untuk mendirikan perusahaan daerah (BUMD) yang nantinya diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat memberikan kontribusi pembangunan. Kontribusi tersebut dapat berupa deviden yang dibayarkan kepada daerah dan kontribusi BUMD kepada anggaran daerah atau juga dengan memanfaatkan kekayaan daerah seperti penyewaan tanah dan bangunan daerah, yang dapat mendatangkan tambahan bagi penerimaan daerah (UU No 33 Tahun 2004).

2.2.4 Lain-lain pendapatan yang sah

Selain dari ketiga sumber yang telah diuraikan di atas sumber pendapatan asli daerah dapat pula diperoleh dari pendapatan lain-lain yang sah yang dapat meliputi hasil penjualan kekayaan daerah, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah (UU No 33 Tahun 2004).

2.3 Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah menciptakan kemandirian daerah. Dalam perspektif ini, pemerintah daerah (pemda) diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan

Asli Daerah. Ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat dari tahun ke tahun semakin dibatasi. Oates (1995) memberikan alasan yang cukup rasional mengapa pemda harus mengurangi ketergantungan ini:

1. Transfer pusat biasanya disertai dengan persyaratan tertentu, sehingga otonomi relatif bersifat kompromis, terlebih bila dana transfer meruokan sumber dominan penerimaan lokal.
2. ketergantungan pada transfer justru menguarangi kreatifitas lokal untuk mengambil kebijakan terkait dengan penerimaan lokal yang lebih efisien.

Pendapatan Asli Daerah idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal. Sumber pendapatan lain relatif fluktuatif dan cenderung di luar kontrol (kewenangan) pemerintah daerah. Data menunjukkan bahwa kontribusi PAD meningkat dari 6,59% pada tahun 2001 menjadi 7,33% pada tahun 2002 (Badan Pusat Statistik, 2004), dengan sumber utama penerimaan dari pajak daerah dan retribusi. Namun demikian kontribusi PAD ini masih sangat kecil bila dibandingkan dengan transfer pusat (DAU dan DAK) yang mencapai 79,14%.

Lewis (2003) menemukan terjadi kenaikan penerimaan yang cukup signifikan terkait dengan penerimaan pemda, yaitu sebesar 56% untuk pemerintah propinsi dan 103% untuk pemerintah kota dan kabupaten. Dari kenaikan tersebut, PAD memberikan kontribusi pada masing-masing pemda sebesar 76% dan 46%. Gambaran ini menunjukkan belum optimalnya pemda (khususnya kabupaten dan kota) dalam menggali potensi lokal yang dimiliki.

Peningkatan PAD sebenarnya merupakan eksis dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan

mendapatkan kenaikan PAD. Dari perspektif ini seharusnya pemda lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak ataupun retribusi.

2.4 PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang sangat penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dan sekaligus berguna untuk menentukan arah pembangunan dimasa yang akan datang. PDRB secara tidak langsung juga merupakan salah satu indikator yang dapat dipergunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam mengelola SDA maupun sumber daya lain yang dimilikinya. Pertumbuhan ekonomi daerah dari tahun ke tahun dapat dilihat melalui besarnya PDRB baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan.

Sedangkan PDRB dihitung dari nilai tambah yang dihasilkan dari sektor–sektor perekonomian daerah, yakni:

1. Pertanian, perikanan dan kelautan.
2. Pertambangan dan penggalian.
3. Industri pengolahan.
4. Listrik, gas dan air bersih.
5. Konstruksi.
6. Perdagangan, hotel dan restoran.
7. Angkutan dan komunikasi.

8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.
9. Jasa-jasa.

2.5 Penelitian-penelitian terdahulu dan penarikan hipotesis

Penelitian mengenai Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah juga pernah dilakukan oleh Priyo Hari Adi mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan dan pendapatan asli daerah yang mengambil sampel di Jawa dan Bali. Penelitian tersebut menghasilkan analisis bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD. Sayangnya, pertumbuhan ekonomi pemda kabupaten dan kota masih kecil, akibatnya penerimaan PAD-nya pun kecil. Terkait dengan PAD, penerimaan yang menjadi andalan adalah *retribusi* dan *pajak daerah*. Tingginya retribusi bisa jadi merupakan indikasi semakin tingginya itikad pemerintah untuk memberikan layanan publik yang lebih berkualitas. Belanja pembangunan diarahkan pada sektor yang langsung dinikmati oleh masyarakat (Mardiasmo, 2002).

Penelitian ini juga menghasilkan bahwa belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi.

Riset ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari riset-riset sebelumnya. Hasil-hasil riset dikembangkan dalam sebuah model yang lebih komprehensif dengan menggunakan pengujian secara simultan (efek langsung dan tidak langsung sebuah variabel dengan variabel lainnya). Beberapa temuan penting

dapat memberikan kontribusi penting untuk pengembangan teori ataupun sebagai acuan riset-riset lebih lanjut. Beberapa temuan dimaksud adalah sebagai berikut:

- Hasil penelitian menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Temuan ini sejalan dengan temuan Oates (1995), Lin dan Liu (2000) yang membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mendukung sintesa yang menyatakan bahwa, pemberian otonomi yang lebih besar memberikan peluang bagi daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan pelayanan publik (Lin dan Liu, 2000; Mardiasmo, 2002; Wong, 2004).
- Pertumbuhan ekonomi memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan PAD. Temuan penelitian ini konsisten dengan Saragih (2003) yang menyatakan bahwa peningkatan PAD sebenarnya merupakan eksese dari pertumbuhan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan Bappenas (2000) yang menyatakan bahwa, pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan PDRB.
- Hasil penelitian lain yang sejalan dengan penelitian sebelumnya adalah terkait dengan hubungan antara belanja pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Temuan penelitian sangat sejalan dengan Wong (2002) yang menunjukkan adanya kontribusi positif terhadap PAD ketika pemerintah melakukan pembangunan pada sektor industri. Hasil ini juga mendukung

Lin dan Liu (2000) berhasil membuktikan adanya korelasi yang kuat antara share belanja investasi dengan tingkat desentralisasi.

2.5.1 Peranan Belanja Pembangunan dalam Desentralisasi Fiskal

Optimalisasi penerimaan PAD hendaknya didukung dengan upaya pemda meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi PAD yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro (Mardiasmo, 2002). Tidak efektifnya berbagai perda baru (terkait dengan retribusi dan pajak) selama tahun 2001 bisa jadi menunjukkan tidak adanya relasi positif antara berbagai pungutan baru itu dengan kesungguhan pemda dalam meningkatkan mutu layanan publik (Lewis, 2003). Wurzel (1999) menegaskan meskipun mempunyai kewenangan untuk menarik pajak dan retribusi (*charge*), kewenangan ini perlu dipertimbangkan untung-ruginya (*cost and benefit*), misal dalam penentuan tarif layanan publik. Keengganan masyarakat untuk membayar pajak ataupun retribusi bisa jadi disebabkan kualitas layanan publik yang memprihatinkan. Akibatnya produk yang seharusnya bisa dijual justru direspon negatif (Mardiasmo, 2002).

Berbagai belanja yang dialokasi pemerintah, hendaknya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Untuk itu, untuk kepentingan jangka pendek, pungutan yang bersifat *retribusi* lebih relevan dibanding pajak. Alasan yang mendasari, pungutan ini berhubungan secara langsung dengan masyarakat. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas

layanan publik tidak mengalami peningkatan (Mardiasmo, 2002). Dari 803 perda penerimaan daerah, 90,3 % merupakan retribusi (Lewis, 2003). Namun, banyaknya perda ini tidak memberikan tambahan pendapatan daerah yang signifikan. Hal ini menunjukkan indikasi adanya tingkat layanan publik yang masih rendah.

Pergeseran komposisi belanja ini, juga digunakan untuk pembangunan fasilitas modal yang dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan Wong (2004) menunjukkan pembangunan sektor industri tertentu (dalam hal ini sektor jasa dan retail) memberikan kontribusi positif terhadap kenaikan pajak. Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Mereka menemuka adanya korelasi yang kuat antara *share* (belanja) investasi pada infrastruktur dengan tingkat desentralisasi. Strategi alokasi anggaran pembangunan ini pada gilirannya mampu mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menjadi alat untuk mengurangi disparitas regional (Madjidi, 1997)

Dari pemaparan ini dapat ditarik 2 hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 (H1):

Belanja Modal (Pembangunan) mempunyai dampak positif terhadap
Pertumbuhan Ekonomi.

Hipotesis 2 (H2):

Belanja Modal (Pembangunan) mempunyai dampak positif terhadap
peningkatan PAD.

2.5.2 Arti Pertumbuhan Daerah bagi Kemandirian Daerah

Salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah menciptakan kemandirian daerah. Dalam perspektif ini, pemerintah daerah (pemda) diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (Sidik, 2002). Ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat dari tahun ke tahun harus semakin dibatasi. Oates (1995) memberikan alasan yang cukup rasional mengapa pemda harus mengurangi ketregantungan ini :

- Transfer pusat biasanya disertai dengan persyaratan tertentu, sehingga otonomi relatif bersifat kompromis, terlebih bila dan transfer merupakan sumber dominan penerimaan lokal.
- Ketergantungan pada transfer justru mengurangi kreatifitas lokal untuk mengambil kebijakan terkait dengan penerimaan lokal yang lebih efisien.

Pendapatan Asli Daerah idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal. Sumber pendapatan lain relatif fluktuatif dan cenderung diluar kontrol (kewenangan) pemerintah daerah (Sidik, 2002; Bappenas, 2003). Data menunjukkan bahwa kontribusi PAD meningkat dari 6,59 % pada tahun 2001 menjadi 7,33 % pada tahun 2002 (Badan Pusat Statistik, 2004), dengan sumber utama penerimaan dari pajak daerah dan retribusi. Namun demikian, kontribusi PAD ini masih sangat kecil bila dibandingkan dengan transfer pusat (DAU dan DAK) yang mencapai 79,14 %.

Lewis (2003) menemukan terjadi kenaikan penerimaan yang cukup signifikan terkait dengan penerimaan pemda, yaitu sebesar 56 % untuk pemerintah propinsi dan 103 % untuk pemerintah kabupaten dan kota. Dari kenaikan tersebut, PAD memberikan kontribusi pada masing-masing pemda sebesar 76 % dan 46 %. Gambaran ini menunjukkan belum optimalnya pemda (khususnya kabupaten dan kota) dalam menggali potensi lokal yang dimiliki.

Peningkatan PAD sebenarnya merupakan eksekusi dari pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2003). Daerah yang pertumbuhannya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dari perspektif ini seharusnya pemda lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak ataupun retribusi.

Sektor-sektor industri, khususnya jasa, perlu dioptimalisasi. Pajak dan retribusi (sebagai komponen terbesar PAD) sangat terkait dengan kegiatan sektor industri. Pajak dan retribusi sebenarnya merupakan eksekusi/nilai tambah dari lebih optimalnya sektor industri ini (Kadjetmiko dan Mahi dalam Sidik, 2002). Dengan kata lain, pertumbuhan domestik dari sektor ini dapat digunakan untuk mengestimasi besarnya PAD (pajak dan retribusi) yang akan diterima.

Pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan PDRB. Analisis elastisitas PAD terhadap PDRB yang dilakukan oleh Bappenas (2003) pada pemerintah propinsi menunjukkan ada 12 propinsi (41,37 %) yang mempunyai nilai elastisitas ≥ 1 (lebih dari satu). Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi perubahan PDRB akan memberikan dampak yang positif dan

signifikan terhadap perubahan PAD. Sedangkan propinsi yang lain perubahan PDRB-nya tidak cukup mempengaruhi perubahan PAD. Patut diduga adanya kenaikan nilai tambah PDRB lebih banyak keluar dari daerah tersebut.

Dalam era desentralisasi fiskal hal semacam ini wajar terjadi, mengingat adanya kompetisi antar pemerintah dalam memfasilitasi berbagai sektor guna memacu pertumbuhan ekonomi lokal. Sebagai contoh adalah dibukanya peluang berinvestasi dengan berbagai kemudahan. Tingginya aktivitas investasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya memberikan pemasukan yang signifikan bagi pemerintah daerah setempat (Lin dan Liu, 2000; Saragih, 2003; Bappenas, 2003).

Hipotesis yang dapat dikembangkan dari pemaparan ini adalah:

Hipotesis 3 (H3):

Pertumbuhan Ekonomi memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan PAD.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh Kabupaten / Kota yang ada di Indonesia. Dan karena penelitian ini merupakan studi kasus yang mengambil Pemerintah Kabupaten / Kota di pulau Kalimantan sehingga sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten / Kota di pulau Kalimantan yang terdiri dari 31 Pemerintah Kabupaten / Kota yaitu 7 Pemerintah Kabupaten dan 1 Pemerintah Kota untuk Provinsi Kalimantan Barat. Sementara 8 Kabupaten dan 2 Pemerintah Kota untuk Provinsi Kalimantan Selatan, 5 Pemerintah Kabupaten dan 1 Kota untuk Provinsi Kalimantan Tengah dan 6 Pemerintah Kabupaten dan 1 Pemerintah Kota untuk Provinsi Kalimantan Timur.

3.2 Data dan Sumber Data

Cara pemilihan data pada penelitian ini akan dilakukan secara tidak random atau bersifat *purposive*. *Purposive sampling* adalah penentuan sample berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti. Penentuan kriteria sampel diperlukan untuk menghindari adanya *mis spesifikasi* dalam penentuan sampel penelitian, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap hasil analisis, selain itu pemilihan data secara *purposive* ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang representatif berdasarkan kualifikasi yang telah ditentukan.

Adapun kualifikasi yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pemerintah daerah kabupaten/kota yang berada di Kalimantan.
- 2) Pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyertakan laporan realisasi APBD tahun 2001-2006.
- 3) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada harga konstan 2000 menurut kabupaten/kota tahun 2001-2006.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang didapat secara tidak langsung dari sumbernya. Peneliti mendapatkan data realisasi APBD Kabupaten/Kota se Kalimantan dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melalui Badan Pusat Statistik Jakarta dan DI Yogyakarta.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.3.1 Belanja Pembangunan

Selain dari belanja rutin pemerintah juga mengeluarkan belanja yang sifatnya tidak rutin dan umumnya menghasilkan wujud fisik yang manfaatnya lebih dari satu tahun. Belanja pembangunan dikeluarkan oleh pemerintah yang mana manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat karena memang belanja pembangunan dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan publik. Sebagai contoh belanja untuk pembangunan jalan, gedung-gedung sekolah, rumah sakit, pembangunan jembatan dan sebagainya. Kesemuanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

3.3.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari pungutan daerah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Misalnya pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, lain-lain pendatan yang sah. Besarnya pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan memelihara serta mendukung hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang (Mamesah, 1995).

3.3.3 Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Salah satu tujuan utama desentralisasi fiscal adalah menciptakan kemandirian daerah. Dalam perspektif ini, pemerintah daerah (pemda) diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah. Ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat dari tahun ke tahun semakin dibatasi. Oates (1995) memberikan alasan yang cukup rasional mengapa pemda harus mengurangi ketergantungan ini:

1. Transfer pusat biasanya disertai dengan persyaratan tertentu, sehingga otonomi relatif bersifat kompromis, terlebih bila dana transfer merupakan sumber dominan penerimaan lokal.
2. ketergantungan pada transfer justru menguarangi kreatifitas lokal untuk mengambil kebijakan terkait dengan penerimaan lokal yang lebih efisien.

3.3.4 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang sangat penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dan sekaligus berguna untuk menentukan arah pembangunan dimasa yang akan datang. PDRB secara tidak langsung juga merupakan salah satu indikator yang dapat dipergunakan untuk menilai kemampuan daerah dalam mengelola SDA meupun sumber daya lain yang dimilikinya. Pertumbuhan ekonomi daerah dari tahun ke tahun dapat dilihat melalui besarnya PDRB baik berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000.

Sedangkan PDRB dihitung dari nilai tambah yang dihasilkan dari sektor–sektor perekonomian daerah, yakni:

1. Pertanian, perikanan dan kelautan.
2. Pertambangan dan penggalian.
3. Industri pengolahan.
4. Listrik, gas dan air bersih.
5. Konstruksi.
6. Perdagangan, hotel dan restoran.
7. Angkutan dan komunikasi.
8. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.
9. Jasa–jasa.

3.3.5 Pengukuran Variabel.

Berdasarkan pokok masalah dan hipotesis yang akan diuji maka variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

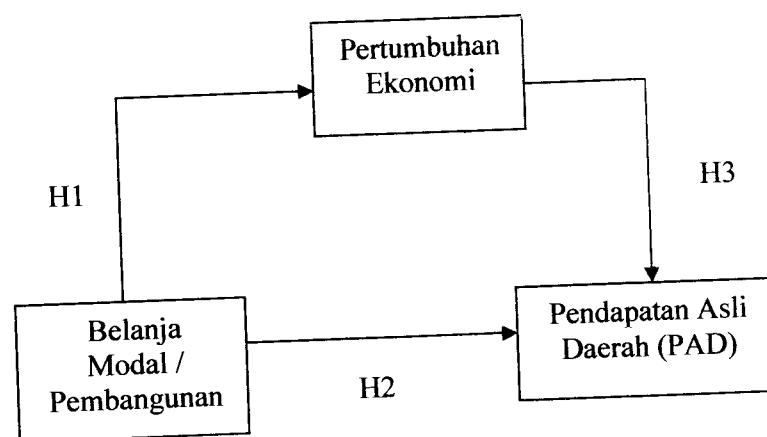
- 1) Variabel tergantung (*dependent variable*), dalam penelitian ini variabel tergantungnya adalah Pertumbuhan Ekonomi untuk melihat pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sedangkan untuk melihat pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah, variabel tergantungnya adalah Pendapatan Asli Daerah
- 2) Variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah Belanja Modal dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota yang ada, sedangkan untuk melihat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) variabel bebasnya adalah Pertumbuhan Ekonomi dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota yang ada.
- 3) Variabel Intervening (*intervening variable*) merupakan variabel yang berada dalam model diluar variabel independent dan dependen. Secara definitif variabel intervening didefinisikan sebagai variabel yang mempengaruhi secara tidak langsung variabel dependennya. Karena tidak mempengaruhi secara tidak langsung, variabel ini dapat memperkuat atau melemahkan pengaruh prediktor terhadap variabel dependen. Dalam penelitian

ini, yang menjadi variabel intervening adalah pertumbuhan ekonomi untuk melihat pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Baik variabel tergantung, variabel bebas, dan variabel intervening pengukurannya sudah tersedia dalam laporan realisasi APBD pada masing-masing pemerintah kabupaten/kota se Kalimantan, sehingga dalam hal ini peneliti bisa langsung mengambil data realisasi belanja pembangunan, data realisasi PAD, sedangkan untuk data PDRB diambil dari publikasi Biro Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan yaitu data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan 2000 menurut kabupaten/kota tahun 2001-2006.

3.4 Model Penelitian

Untuk melihat model penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tentang pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan PAD dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1: Model Penelitian (H1-H3)

3.5 Metode Analisis Data

Untuk menguji pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah, dilakukan dengan menggunakan alat analisis statistik regresi linear sederhana.

Sebelum melakukan pengujian uji asumsi klasik, terlebih dahulu dilakukan regresi linear sederhana :

Regresi Linear Sederhana

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data *time series*.

- a. Untuk menguji pengaruh Belanja Modal terhadap PAD persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y_t = a + b_1 X_{1(t-1)} + e$$

Dimana, Y_t : PAD sebagai variabel tergantung.

a : konstanta yang menunjukkan besar nilai Y bila nilai X = 0.

b_1 : konstanta yang menunjukkan besar peran X dalam menentukan besar Y.

$X_{1(t-1)}$: jumlah Belanja Modal satu tahun sebelum tahun anggaran sebagai variabel bebas.

e : error.

- b. Untuk menguji pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi, persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y_t = a + b_2 X_{2(t-1)} + e$$

Dimana, Y_t : Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel tergantung.

a : konstanta yang menunjukkan besar nilai Y bila nilai X = 0.

b_2 : konstanta yang menunjukkan besar peran X dalam menentukan besar Y.

$X_{2(t-1)}$: jumlah Belanja Modal satu tahun sebelum tahun anggaran sebagai variabel bebas..

e : error.

c. Sedangkan untuk menguji pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel intervening nya, maka persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y_1 = a + b_1 X_{1(t-1)} + e$$

$$Y_2 = a + b_2 X_{2(t-1)} + e$$

Besarnya pengaruh tidak langsung = $b_1 \times b_2$

Dimana,

Y_1 : Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel tergantung (BM ke PE).

Y_2 : PAD sebagai variabel tergantung (PE ke PAD).

Y_3 : Besarnya pengaruh hubungan tidak langsung.

a : konstanta yang menunjukkan besar nilai Y bila nilai X = 0.

$b_1 - b_2$: konstanta yang menunjukkan besar peran X dalam menentukan besar Y.

$X_1 (t-1)$: Belanja Modal satu tahun sebelum tahun anggaran sebagai variabel bebas.

$X_2 (t-1)$: Pertumbuhan Ekonomi satu tahun sebelum tahun anggaran sebagai variabel interveningnya.

e : error.

Uji Asumsi Klasik

Setelah melakukan analisis regresi linier berganda, dilakukan uji asumsi klasik agar hasil kesimpulan yang diperoleh tidak menimbulkan nilai yang bias. Adapun uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi dan Uji Normalitas.

1. Multikolinearitas.

Artinya antara variabel bebas yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna atau yang mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau=1). Konsekuensi kesalahan standar estimasi cenderung meningkat dengan bertambahnya variabel bebas, tingkat signifikan untuk menolak hipotesa nol semakin besar dan probabilitas menerima hipotesis yang salah juga akan semakin besar. Akibatnya model regresi tidak valid untuk menaksir nilai variabel tergantung.

Analisis untuk mengetahui adanya multikolinearitas sebagai berikut:

Melihat t hitung, R Square dan F ratio. Jika R Square tinggi, nilai F ratio tinggi, sedangkan sebagian besar atau seluruh koefisien regresi tidak signifikan (nilai t hitung sangat rendah). Menentukan koefisien korelasi

antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lain. Jika antara dua variabel bebas memiliki korelasi yang spesifik maka di dalam model regresi terdapat multikolinearitas.

2. Heteroskedastisitas.

Artinya varians variabel dalam model tidak sama (konstan). Konsekuensi adalah penaksir (estimator) yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun besar. Ada beberapa cara untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas yaitu dengan: metoda Park, metoda Gletser, metoda Spearman Rank Corelation dan Goldfield–Quandt.

3. Autokorelasi.

Artinya terjadi korelasi antara anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Penyimpangan ini biasanya muncul pada observasi yang menggunakan data *time series*. Konsekuensinya varians sampel tidak dapat menggambarkan varians populasinya. Model regresinya tidak dapat untuk menaksir nilai variabel tergantung pada nilai variabel bebas tertentu.

Untuk menganalisis adanya autokorelasi yang dipakai adalah Uji Ratio Vneuman dan Uji Durbin Watson. Pengaruh autokorelasi yang terdapat dalam suatu model regresi dihilangkan dengan memasukkan lag variabel bebasnya.

4. Normalitas.

Menguji apakah sebuah model regresi variabel tergantung, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal ataukah mendekati normal.

Deteksi normalitas dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik.

Dasar pengambilan keputusan:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi Normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi Normalitas.

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan pengumpulan data yang berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota di pulau Kalimantan Periode tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 yang diperoleh dari BPS Yogyakarta dan BPS Jakarta, selanjutnya peneliti melakukan analisis data. Analisis data ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal, terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui variabel intervening pertumbuhan ekonomi (Pertumbuhan ekonomi) se pulau Kalimantan.

Teknik analisis yang digunakan terdiri dari analisis deskriptif dan analisis statistik. Analisis deskriptif yaitu analisis yang menjelaskan tentang gambaran data-data variabel penelitian yang terdiri dari nilai tertinggi dan nilai terendah. Sedangkan analisis statistik merupakan analisis yang dilakukan dengan pembuktian statistik untuk membuktikan hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini analisis statistik digunakan analisis jalur (path Analysis) dengan bantuan analisis regresi linier sederhana.

4.1 Analisis Deskriptif

Hasil analisis deskriptif terhadap variabel penelitian dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif
(dalam Ribuan)

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Daerah (t-1)	155	16028827.00	620853834.00	150542207.084	111955491.3
Laju PDRB (t)	155	-7.09	23.81	5.5304	3.96829
PAD (t)	155	1016058.00	86362930.00	15481859.6065	12488574.20
Valid N (listwise)	155				

Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.1, jumlah kabupaten yang menjadi sampel adalah 31 kabupaten/kota di pulau Kalimantan yang memiliki data lengkap PAD, Belanja Modal dan Laju PDRB. Nilai PAD tertinggi adalah Tarakan pada tahun 2004 yaitu sebesar Rp. 86.362.930.000 dan nilai terendah adalah kabupaten Landak pada tahun 2002 yaitu sebesar Rp. 1.016.058.000.

Sedangkan untuk Belanja modal tertinggi terjadi di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2004 dengan nilai Belanja Modal sebesar Rp. 620.853.834.000. Nilai terendah Belanja modal terjadi di kabupaten Palangkaraya pada tahun 2001 yaitu sebesar Rp. 16.028.827.000.

Untuk Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di kabupaten Kutai Timur pada tahun 2004 yaitu sebesar 23,81%. Sedangkan Pertumbuhan ekonomi terendah terjadi di Kabupaten Barito Utara tahun 2002 yaitu sebesar -7,09%.

4.2. Analisis Statistik

Analisis statistik merupakan analisis yang digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian. Analisis ini menggunakan Analisis Regresi Linier Sederhana dan analisis jalur (path analysis). Sebelum dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu dilakukan uji regresi.

4.2.1. Analisis Regresi Linier Sederhana

Untuk mengetahui pengaruh Belanja modal terhadap Pertumbuhan ekonomi, pengaruh Belanja Modal terhadap PAD dan pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap PAD digunakan analisis Regresi Linier Sederhana.

Hasil Regresi tersebut dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.2
Hasil Analisis Regresi Linier Sederhana

Dependent	Independen	Koefisien	Beta	t	p-value	R Square.
Pertumbuhan ekonomi (Yt)	Constanta	3.482		7.023	0.000	0.147
	Belanja Modal (Xt-1)	1.4E-08	0.384	5.141	0.000	
PAD (Yt)	Constanta	7336038		4.964	0.000	0.235
	Belanja Modal (Xt-1)	0.054	0.485	6.861	0.000	
PAD (Yt)	Constanta	1.4E+07		7.121	0.000	0.042
	Pertumbuhan ekonomi (Xt-1)	675028.0	0.205	2.311	0.023	

Sumber : Data sekunder diolah, 2007

Pada penelitian ini digunakan model persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y_{(t)} = a + b_1 X_{(t-1)} + e$$

Dengan memperhatikan model regresi model Lag 1 maka didapat persamaan tentang pengaruh Belanja Modal tahun sebelumnya terhadap Pertumbuhan ekonomi tahun berjalan, pengaruh Belanja Modal tahun sebelumnya terhadap PAD tahun berjalan dan Pengaruh Pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya terhadap PAD tahun berjalan

Pertumbuhan ekonomi (t) = 3.482 + 0.000000014 Belanja Modal (t-1)	1
PAD(t) = 7336038 + 0.054 Belanja Modal (t-1).....	2
PAD(t) = 14000000 + 675028 Pertumbuhan ekonomi(t-1).....	3

4.2.1.1 Pengaruh Belanja Modal tahun sebelumnya terhadap Pertumbuhan ekonomi tahun berjalan

Berdasarkan nilai persamaan 1 maka besarnya konstanta sebesar 3.482 dapat diartikan jika tidak ada belanja modal pada periode tahun sebelumnya di pemerintah daerah kabupaten propinsi se pulau Kalimantan, maka besarnya Pertumbuhan ekonomi tahun berjalan akan sebesar 3.482 juta. Namun jika dipengaruhi oleh Belanja Modal sebesar 1% maka Pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0.000000014 % dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan.

Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa diperoleh t statistik sebesar 5.141 dan p-value sebesar 0,000 yang nilainya kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak yang berarti belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap nilai Pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti semakin besar nilai belanja modal maka semakin tinggi pula Pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan demikian Hipotesis pertama yang menyatakan “Belanja Modal mempunyai dampak positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah ” **dapat didukung**.

Hal ini disebabkan karena Pergeseran komposisi belanja, juga digunakan untuk pembangunan fasilitas modal yang dibutuhkan bagi

pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan Lin dan Liu (2000) menyatakan pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Mereka menemukan adanya korelasi yang kuat antara share (belanja) investasi pada infrastruktur dengan tingkat desentralisasi. Strategi alokasi anggaran pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menjadi alat untuk mengurangi disparitas regional (Madjid, 1997)

Untuk mempercepat pembangunan, kebutuhan akan modal bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Modal tersebut harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat dalam menggerakkan perekonomian pada sektor-sektor produktif. Seperti teori pertumbuhan ekonomi dari Adam Smith melihat sistem produksi suatu negara terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu: sumber-sumber alam yang tersedia, sumber-sumber manusiawi dan stok barang kapital. Ketiga unsur tersebut merupakan modal dasar pembangunan ekonomi, karena sumber alam merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi masyarakat, penduduk sangat berperan dalam menggunakan sumber-sumber alam yang tersedia dan harus didukung oleh stok kapital yang ada (Boeditono, 1999). Semakin tinggi nilai belanja modal maka semakin bagus tingkat pembangunan suatu daerah, sehingga pelayanan publik menjadi lebih baik. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi meningkat.

4.2.1.2. Pengaruh Belanja Modal tahun sebelumnya terhadap PAD tahun Berjalan

Berdasarkan nilai persamaan 2 maka besarnya konstanta sebesar 7336038 dapat diartikan jika tidak ada belanja modal tahun sebelumnya di pemerintah daerah kabupaten propinsi se pulau Kalimantan, maka besarnya PAD tahun berjalan akan sebesar 7336038. Namun jika dipengaruhi oleh Belanja Modal sebesar 1% maka PAD akan meningkat sebesar 0.054 % dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan.

Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa diperoleh t statistik sebesar 6.861 dan p-value sebesar 0,000 yang nilainya kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak yang berarti belanja modal tahun sebelumnya berpengaruh positif signifikan terhadap nilai PAD tahun berjalan. Hal ini berarti semakin besar nilai belanja modal maka semakin tinggi pula PAD suatu daerah. Dengan demikian Hipotesis kedua yang menyatakan “Belanja Modal mempunyai pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah ” **dapat didukung**.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Friedman (1978) menyatakan bahwa kenaikan dalam pajak akan meningkatkan belanja daerah, sehingga akan memperbesar defisit. Hal ini disebabkan karena meningkatkan belanja modal, maka tingkat pembangunan fisik suatu daerah akan menjadi semakin baik, dan pelayanan publikpun semakin bagus. Hal ini tentunya akan mendorong para wajib pajak untuk lebih sadar dalam membayar kewajibannya,

mengingat sesuai dengan pelayanan yang telah mereka terima. Hal ini tentunya akan dapat meningkatkan nilai PAD karena sumber utama PAD berasal dari pajak, retribusi, Laba BUMD, dan sumber pendapatan asli daerah lainnya. Optomalisasi penerimaan PAD hendaknya didukung dengan upaya pemda meningkatkan kualitas layanan publik.

4.2.1.3. Pengaruh Pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya terhadap PAD tahun berjalan

Berdasarkan nilai persamaan 3 maka besarnya konstanta sebesar 14000000 dapat diartikan jika tidak ada Pertumbuhan ekonomi di pemerintah daerah kabupaten propinsi se pulau Kalimantan periode sebelumnya, maka besarnya PAD tahun berjalan akan sebesar 14000000. Namun jika dipengaruhi oleh Pertumbuhan ekonomi sebesar 1% maka PAD akan meningkat sebesar 675028.0 % dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan.

Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa diperoleh t statistik sebesar 2.311 dan p-value sebesar 0,023 yang nilainya kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak yang berarti Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai PAD. Hal ini berarti semakin besar nilai Pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula PAD suatu daerah. Dengan demikian Hipotesis ketiga yang menyatakan “Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)” **dapat didukung**.

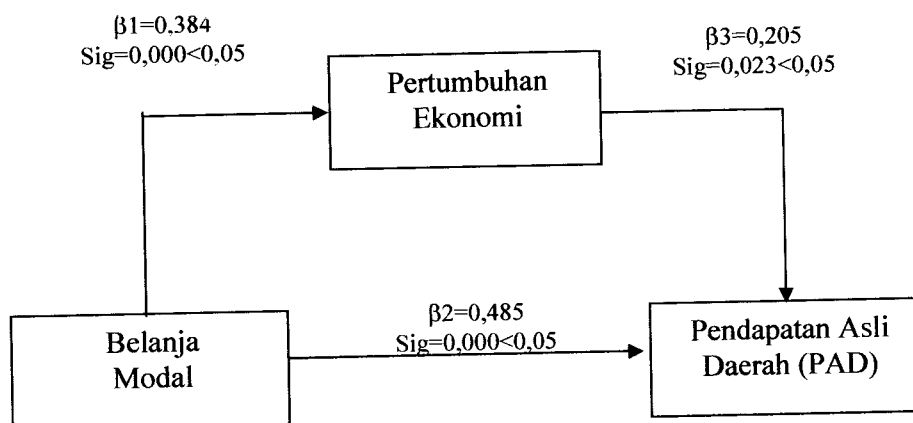
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saragih (2003) menyatakan bahwa, peningkatan PAD sebenarnya akses dari pertumbuhan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan Bappenas (2000) yang menyatakan pertumbuhan PAD harus sensitif dengan kenaikan PDRB. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka semakin besar pula potensi daerah untuk menghasilkan sumber-sumber pendapatan daerah. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka tingkat pendapatan masyarakat semakin tinggi, sehingga pajak dapat ditingkatkan. Begitu pula dengan sarana dan prasarana yang semakin baik, akan dapat meningkatkan nilai retribusi daerah. Dalam kondisi ini BUMN dan BUMD juga dapat tumbuh secara baik, sehingga laba yang diperoleh untuk mendongkrak nilai PAD pun juga semakin tinggi.

Lewis (2003) menemukan terjadi kenaikan penerimaan yang cukup signifikan terkait dengan penerimaan pemerintah daerah, yaitu sebesar 56% untuk pemerintah propinsi dan 103% untuk pemerintah kabupaten dan kota. Dari kenaikan tersebut, PAD memberikan kontribusi masing-masing pemerintah daerah sebesar 76% dan 46%. Gambaran ini menunjukkan belum optimalnya kinerja pemerintahan daerah (khususnya kabupaten dan kota) dalam menggali potensi lokal yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan besarnya kontribusi Pertumbuhan ekonomi yang hanya sebesar 1,9% (nilai koefisien determinasi pada persamaan 3) yang menunjukkan kontribusi Pertumbuhan ekonomi terhadap PAD masih terlalu kecil.

Peningkatan PAD sebenarnya merupakan eksens dari pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2003). Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dari gambaran ini seharusnya pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dari pada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak atau retribusi.

Sektor-sektor industri, khususnya jasa perlu dioptimalkan pajak dan retribusi sebagai komponen terbesar PAD sangat terkait dengan kegiatan sektor industri. Pajak dan retribusi sebenarnya merupakan nilai tambah dari lebih optimalnya sektor industri ini (Kadajtmiko dan Mahi dalam Sidik, 2002) dengan kata lain pertumbuhan domestik dari sektor ini dapat digunakan untuk menyetimasi besarnya PAD (pajak dan retribusi) yang akan diterima.

Dari hasil analisis regresi linier sederhana model Lag-1 di atas maka dapat digambarkan ilustrasi jalur sebagai berikut:



Gambar 4.2 Gambar Ilustrasi Jalur

Berdasarkan gambar 4.1. dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh secara langsung belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien jalur (beta) sebesar 0,384 ($p=0,000<0,05$). Sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan koefisien jalur sebesar 0,205 ($p=0,023<0,05$). Dengan demikian dapat diketahui besarnya pengaruh tidak langsung belanja modal terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar :

$$\begin{aligned} \text{Pengaruh tidak langsung} &= \beta_1 \times \beta_3 = 0,384 \times 0,205 \\ &= 0,07872 \end{aligned}$$

Sementara dari sisi yang lain menunjukkan bahwa Belanja modal berpengaruh secara langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan koefisien jalur $\beta_2=0,485$ dan signifikan ($p=0,000<0,05$). Dengan demikian pengaruh langsung Belanja modal terhadap PAD lebih besar dibandingkan dengan pengaruh tidak langsungnya melalui pertumbuhan ekonomi ($0,485>0,07872$).

Hal ini disebabkan karena belanja modal yang tinggi menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan dalam suatu daerah tersebut cukup pesat dan meningkat, sehingga akan meningkatkan kemampuan masyarakatnya dalam membayar seluruh kewajiban termasuk pajak, dan retribusi sehingga dapat meningkatkan secara langsung nilai PAD untuk satu tahun kedepan.

4.2.2. Uji Asumsi Klasik

Setelah melakukan analisis regresi linier berganda, dilakukan uji asumsi klasik agar hasil kesimpulan yang diperoleh tidak menimbulkan nilai yang bias. Adapun uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi dan Uji Normalitas.

a. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah situasi adanya hubungan variabel–variabel bebas diantara satu dengan lainnya. Dalam hal ini disebut variabel–variabel bebas tidak orthogonal. Variabel yang bersifat orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi sesamanya sama dengan nol. Jika terdapat korelasi yang sempurna diantara sesama variabel–variabel bebas ini sama dengan satu, maka koefisien regresinya tidak dapat ditaksir dan nilai standar error setiap koefisien regresi menjadi tidak terhingga.

Hasil uji multikolinieritas dapat ditunjukkan pada tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3

Uji Multikolinieritas

Correlations

		Belanja Daerah (t-1)	Laju PDRB (t-1)
Belanja Daerah (t-1)	Pearson Correlation	1	.363**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	155	124
Laju PDRB (t-1)	Pearson Correlation	.363**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	124	124

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas nilai koefisien korelasi untuk kedua variabel bebas yang terdiri dari Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai koefisien korelasi dibawah 0,8 sehingga model regresi yang diajukan dalam penelitian ini tidak mengandung gejala Multikolinieritas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedasitas, dan jika berbeda disebut heteroskedasitas. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi heteroskedasitas adalah metode Glejser.

Tabel 4.4

Hasil Uji Heterokedasitas

	t	Sig	
Residu1 (belanja modal terhadap Pertumbuhan ekonomi)	0.406	0.685	Tdk ada heterokedasitas
Residu2 (Belanja Modal terhadap PAD)	0.904	0.368	Tdk ada heterokedasitas
Residu3 (Pertumbuhan ekonomi terhadap PAD)	-0.200	0.842	Tdk ada heterokedasitas

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai t hitung dan nilai probabilitas (p-value) yang nilainya $> 0,05$ dengan demikian tidak terdapat heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara residual (kesalahan pengganggu) pada periode t dengan residual pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk mengetahui adanya autokorelasi dengan menggunakan besaran Durbin-Watson (D-W). Jika nilai DW berada diantara nilai -2 sampai $+2$ maka dapat dinyatakan tidak terdapat gejala autokorelasi. Hasil pengujian autokorelasi dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Uji Autokorelasi

Model 1	Model 2	Model 3
1,893	1,612	1,459

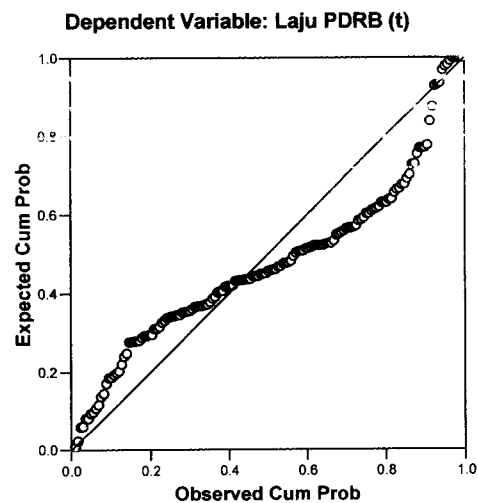
Dari tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson masing-masing sebesar 1,893; 1,612 dan 1,459 yang berada diantara nilai -2 sampai dengan $+2$ sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi tidak terjadi autokorelasi.

d. Uji Normalitas

Untuk menguji data berdistribusi normal atau tidak dilihat dari grafik *Normal P-P of regression standardized residual*. Jika grafik *Normal P-P of regression standardized residual* menunjukkan pola yang mendekati bentuk bel dan plot linear memperlihatkan data yang bergerak mengikuti garis linear diagonal maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Normalitas tersebut dapat di tampilkan pada gambar berikut:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4.3. Hasil Uji Normalitas

Dari gambar 4.1 diatas dapat diketahui jika grafik histogram menunjukkan pola yang mendekati bentuk bel dan plot linear dan memperlihatkan data yang bergerak mengikuti garis linear diagonal maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan :

1. Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se pulau Kalimantan. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa diperoleh t statistik sebesar 5.141 dan p-value sebesar 0,000 yang nilainya kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak yang berarti belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap nilai Pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dimaknakan bahwa semakin besar belanja modal suatu daerah akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah.
2. Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten/kota se pulau Kalimantan. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa diperoleh t statistik sebesar 6.861 dan p-value sebesar 0,000 yang nilainya kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak yang berarti belanja modal tahun sebelumnya berpengaruh positif signifikan terhadap nilai PAD tahun berjalan. Hal ini dapat dimaknakan bahwa semakin besar belanja modal suatu daerah akan meningkatkan nilai penerimaan melalui Pendapatan Asli Daerah.
3. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten/kota se pulau Kalimantan. Pernyataan tersebut dapat

dilihat dari hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa diperoleh t statistik sebesar 2.311 dan p-value sebesar 0,023 yang nilainya kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak yang berarti Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap nilai PAD. Hal ini dapat dimaknakan bahwa semakin besar tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan laju PDRB akan meningkatkan nilai penerimaan melalui Pendapatan Asli Daerah.

4. Belanja modal cenderung berpengaruh secara langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung melalui Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan gambar 4.1. dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien jalur (beta) sebesar 0,384 ($p=0,000<0,05$). Sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara langsung dan signifikan dengan koefisien jalur sebesar 0,205 ($p=0,000<0,05$). Dengan demikian dapat diketahui besarnya pengaruh tidak langsung belanja modal terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar :

$$\begin{aligned} \text{Pengaruh tidak langsung} &= \beta_1 \times \beta_3 = 0,384 \times 0,205 \\ &= 0,07872 \end{aligned}$$

Sementara dari sisi yang lain menunjukkan bahwa Belanja modal berpengaruh secara langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan koefisien jalur $\beta_2=0,485$ dan signifikan ($p=0,000<0,05$). Dengan demikian pengaruh langsung Belanja modal terhadap PAD lebih besar dibandingkan dengan pengaruh tidak langsungnya melalui pertumbuhan ekonomi ($0,485>0,07872$) dan berarti bahwa Pertumbuhan Ekonomi bukan Variabel Intervening pada pengujian pengaruh

Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini berarti penggunaan belanja daerah pada periode tahun lalu, akan dapat secara langsung meningkatkan nilai PAD pada tahun berjalan.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Temuan-temuan dalam kasus ini menunjukkan beberapa hal yang sangat teoritis dapat dipahami. Namun, dalam tataran praktis masih perlu didiskusikan lebih jauh. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam studi-studi selanjutnya. Karena studi ini belum mencakup aspek-aspek lain yang mungkin merupakan faktor penting, misalnya aspek kebijakan publiknya, aspek politisnya, aspek manajemen keuangannya, aspek penganggaran daerah, aspek psikologis personalitas pembuat keputusan pemda.

5.3. Saran

1. Bagi pemerintah daerah kabupaten/Kota se pulau Kalimantan hendaknya dalam melakukan eksploitasi Pendapatan Asli Daerah hendaknya lebih proporsional dan disesuaikan dengan pelayanan publik, sehingga hal ini akan berdampak kembali pada penerimaan PAD selanjutnya, karena masyarakat dapat membayar pajak lebih tinggi sesuai dengan pelayanan yang mereka terima.
2. Pemerintah daerah hendaknya lebih menerapkan sistem *good governance*, sehingga dalam implementasi belanja modal (pembangunan) dapat dikontrol dengan baik dari penyimpangan-penyimpangan seperti korupsi dan manipulasi

anggaran, sehingga pelaksanaannya benar-benar mampu meningkatkan pelayanan publik dan dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang sama dengan obyek yang berbeda, dengan menambahkan variabel-variabel lain seperti belanja daerah, atau dana perimbangan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2006. *Hubungan antara Pertumbuhan ekonomi daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah* (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali) Simposium Nasional Akuntansi IX Padang 23-26 Agustus 2006, Hal 1-21.
- Adi, Priyo Hari. 2005. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Jurnal Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- BAPPENAS. 2003. *Peta Kemampuan Keuangan Propinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2001. *Analisis Deskriptif Pengaruh Fiscal Stress pada APBD Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah*. KOMPAK. STIE YO. Yogyakarta. Hal : 127 – 146.
- Halim, Abdul. 2002. *Seri Akuntansi Publik – Akuntansi keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China*. Economic Development and Cultural Change. Chicago. Vol 49. Hal : 1-21.
- Majidi, N. 1997. *Anggaran Pengembangan dan Ketimpangan Ekonomi antar Daerah*. Prisma. LP3ES. Volume.3. Hal. 3-22.

- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI. Yogyakarta.
- Mamesah, D.J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Oates, Wallace E. 1995. *Comment on "Conflict and Dilemmas of Decentralization" by Rudolf Holmes*. The World Bank Research Observer. Hal : 351 – 355.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia.
- Sidik, Machfud, Raksaka Mahi, Robert Simanjuntak dan Bambang Brodjonegoro. 2002. *Dana Alokasi Umum : Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Kompas. Jakarta.
- Sidik, Machfud. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Daerah*. Wisuda Angkatan XXI STIA LAN Tahun Akademik 2001-2002. Orasi Ilmiah.
- Wahana Komputer, Tim Penelitian dan Pengembangan, 2006. *Pengembangan Analisis Multivariate dengan SPSS 12*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wong, John D. 2004. *The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity*. Journal of Public Budgeting., Accounting and Financial Management. Fall. 16.3. Hal : 413-423.

LAMPIRAN 1
RINGKASAN REALISASI BELANJA MODAL
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN
TAHUN ANGGARAN
2001-2006
(000 Rupiah)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Kabupaten Sambas	62,623,786	69,169,162	215,881,208	210,540,148	227,057,073	329,740,080
Kabupaten Bengkayang	23,751,136	29,850,800	71,925,374	99,188,825	126,564,834	152,177,920
Kabupaten Landak	30,646,124	47,235,247	81,397,225	95,149,996	103,838,666	174,312,850
Kabupaten Pontianak	39,724,453	47,442,888	250,203,105	271,934,838	289,513,634	419,561,600
Kabupaten Sanggau	70,413,499	65,773,451	206,363,740	224,703,568	185,021,351	282,244,960
Kabupaten Ketapang	71,876,848	101,132,862	140,812,330	137,119,276	154,976,486	259,549,560
Kabupaten Sintang	67,671,208	77,823,581	194,655,571	143,163,946	133,677,659	244,251,260
Kabupaten Kapuas Hulu	67,956,319	83,978,393	120,253,254	99,826,431	124,704,721	251,826,880
Kabupaten Kotawaringin Barat	94,372,951	93,470,092	106,900,538	136,443,216	174,515,596	249,799,250
Kabupaten Kotawaringin Timur	158,771,550	236,375,772	165,464,191	173,026,222	165,233,302	249,409,600
Kabupaten Kapuas	93,634,040	116,605,297	164,789,940	196,386,842	213,680,494	323,654,090
Kabupaten Barito Selatan	38,063,202	55,378,168	117,073,965	134,729,785	143,512,762	178,133,310
Kabupaten Barito Utara	76,710,935	93,602,763	76,984,702	51,470,373	69,139,566	157,754,130
Kota Palangkaraya	16,028,827	38,913,935	60,986,594	127,305,387	145,040,369	208,087,360
Kabupaten Tanah Laut	34,193,339	41,980,994	115,471,087	128,942,144	111,112,462	201,979,150
Kabupaten Kota Baru	71,721,695	84,578,231	180,668,836	171,405,790	173,672,725	243,909,130
Kabupaten Banjar	40,402,729	75,098,165	95,179,075	98,011,533	105,520,332	163,729,900
Kabupaten Tapin	29,747,966	50,758,019	109,148,196	115,134,219	133,699,023	184,423,250

Kabupaten Hulu Sungai Selatan	26,691,277	49,914,550	165,327,408	186,321,112	177,511,136	222,907,740
Kabupaten Hulu Sungai Tengah	34,856,998	50,261,355	143,206,978	165,819,066	198,492,213	251,672,600
Kabupaten Hulu Sungai Utara	47,891,734	73,911,744	68,128,228	52,550,166	72,332,271	95,395,440
Kabupaten Tabalong	46,929,806	51,890,230	140,474,392	151,840,166	174,381,080	260,125,670
Kota Banjarmasin	29,384,271	34,280,466	192,569,333	235,129,496	239,618,947	283,834,980
Kota Banjar Baru	31,666,810	62,955,799	90,551,169	95,876,941	107,908,250	133,762,450
Kabupaten Pasir	201,843,316	280,788,489	300,875,415	382,754,159	337,691,525	386,820,210
Kabupaten Kutai Barat	161,372,278	300,500,895	439,258,829	440,111,894	553,837,369	372,897,150
Kabupaten Kutai Timur	161,900,000	187,210,000	489,859,637	620,853,834	478,846,392	421,644,710
Kabupaten Berau	157,662,773	76,941,021	355,905,655	271,287,198	276,276,685	247,109,730
Kabupaten Bulongan	155,457,234	64,084,356	329,247,225	379,730,743	368,162,482	406,667,010
Kabupaten Nunukan	168,855,623	58,541,228	302,946,793	249,444,733	368,519,670	437,805,640
Kota Tarakan	46,990,326	41,135,240	265,168,033	208,338,785	286,367,919	158,627,250

LAMPIRAN 2
RINGKASAN REALISASI LAJU PDRB
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN
TAHUN ANGGARAN
2002-2006
(dalam %)

	2002	2003	2004	2005	2006
1 Kabupaten Sambas	2.98	4.73	4.96	5.76	2.68
2 Kabupaten Bengkayang	4.86	20.42	6.68	9.07	6.29
3 Kabupaten Landak	5.45	2.75	4.66	3.72	5.34
4 Kabupaten Pontianak	4.88	2.36	1.76	3.89	4.15
5 Kabupaten Sanggau	3.83	3.17	7.96	3.35	8.23
6 Kabupaten Ketapang	7.16	7.38	7.23	17.62	12.45
7 Kabupaten Sintang	2.92	4.7	2.63	3.94	4.78
8 Kabupaten Kapuas Hulu	4.05	3.89	0.37	0.45	6.48
9 Kabupaten Kotawaringin Barat	4.15	6.23	6.06	6.15	6.47
10 Kabupaten Kotawaringin Timur	3.66	4.54	5.28	5.61	5.93
11 Kabupaten Kapuas	5.39	5.32	5.2	4.55	4.99
12 Kabupaten Barito Selatan	1.16	2.85	3.84	5.12	5.46
13 Kabupaten Barito Utara	-7.09	-0.37	1.93	3.9	3.18
14 Kota Palangkaraya	1.56	3.63	5.33	5.45	5.51
15 Kabupaten Tanah Laut	4.49	4.64	5.26	5.43	6.22
16 Kabupaten Kota Baru	5.68	5.3	5.17	5.18	4.33
17 Kabupaten Banjar	4.54	5.73	5.39	5.29	3.67
18 Kabupaten Tapin	3.84	3.87	4.37	3.51	4.42
19 Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3.25	4	4.42	3.51	4.99
20 Kabupaten Hulu Sungai Tengah	4.91	4.38	3.45	4.99	5.78
21 Kabupaten Hulu Sungai Utara	3.92	4.02	4.61	3.73	3.71
22 Kabupaten Tabalong	9.64	2.18	3.74	2.42	11.47
23 Kota Banjarmasin	2.74	5.89	4.29	4.86	3.68
24 Kota Banjar Baru	4.7	5.3	4.2	4.91	5.2
25 Kabupaten Pasir	5.03	5.12	6.11	7.82	13.46
26 Kabupaten Kutai Barat	13.49	10.29	5.44	8.21	6.18
27 Kabupaten Kutai Timur	18.3	-3.02	23.81	20.86	22.39
28 Kabupaten Berau	5	4.16	2.64	5.11	5.08
29 Kabupaten Bulongan	3.59	2.18	3.4	2.92	7.48
30 Kabupaten Nunukan	9.39	5.97	9.18	9.58	1.14
31 Kota Tarakan	6.91	11.49	7.17	7.63	7.51

LAMPIRAN 3
RINGKASAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN
TAHUN ANGGARAN
2001-2006
(000 Rupiah)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Kabupaten Sambas	4,813,816	4,639,847	7,042,299	10,267,953	8,198,515	14,260,250
Kabupaten Bengkayang	6,111,133	3,768,707	3,954,422	2,084,925	2,270,000	8,029,710
Kabupaten Landak	1,223,727	1,016,058	2,251,172	2,402,446	2,483,615	13,045,960
Kabupaten Pontianak	4,476,387	4,483,618	8,914,560	9,795,355	11,827,039	20,036,730
Kabupaten Sanggau	3,791,781	4,534,545	8,575,019	10,343,170	8,760,597	14,748,700
Kabupaten Ketapang	19,721,520	13,872,469	10,241,428	12,185,545	9,426,665	15,281,920
Kabupaten Sintang	33,348,771	11,392,091	9,119,526	10,078,779	8,191,075	20,675,420
Kabupaten Kapuas Hulu	5,322,886	24,143,208	5,548,490	3,545,000	2,767,420	8,946,020
Kabupaten Kotawaringin Barat	17,875,435	13,718,515	17,780,176	21,585,920	23,155,634	37,069,050
Kabupaten Kotawaringin Timur	10,900,000	14,600,000	29,016,331	23,939,289	25,271,595	28,676,770
Kabupaten Kapuas	19,402,358	18,921,940	14,242,869	11,009,709	10,250,163	14,132,600
Kabupaten Barito Selatan	4,427,864	7,773,500	6,956,477	5,636,228	6,500,950	12,273,610
Kabupaten Barito Utara	9,209,887	7,281,475	9,077,128	8,855,094	9,600,000	9,987,180
Kota Palangkaraya	4,777,173	8,012,000	8,981,603	8,382,353	11,045,300	21,481,130
Kabupaten Tanah Laut	3,485,212	3,139,327	8,539,154	13,243,890	15,837,800	39,389,650
Kabupaten Kota Baru	28,023,843	8,343,376	25,385,565	24,069,214	25,989,929	35,166,010
Kabupaten Banjar	4,889,258	5,153,294	9,256,065	13,555,810	11,110,670	38,903,770
Kabupaten Tapin	4,767,794	2,245,196	8,361,312	10,917,663	8,591,925	22,412,440

Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3,581,174	3,572,419	9,549,087	11,916,420	13,496,820	17,444,160
Kabupaten Hulu Sungai Tengah	4,411,433	2,711,974	11,667,760	10,269,472	9,024,603	15,510,050
Kabupaten Hulu Sungai Utara	3,565,401	4,244,432	6,459,203	5,152,534	4,640,500	11,612,280
Kabupaten Kabalong	16,961,433	17,653,874	14,057,157	16,356,100	14,001,015	24,524,000
Kota Banjarmasin	18,813,691	12,067,579	29,166,008	38,328,024	34,730,512	45,572,940
Kota Banjarbaru	3,008,000	2,295,393	7,044,155	10,510,914	10,420,050	16,889,800
Kabupaten Pasir	20,558,281	16,793,214	34,673,804	16,914,327	15,577,016	53,383,180
Kabupaten Kutai Barat	11,164,967	5,699,500	36,164,877	28,946,700	32,205,840	18,900,790
Kabupaten Kutai Timur	2,958,256	5,360,000	6,332,330	18,747,975	20,258,080	32,334,740
Kabupaten Berau	11,082,737	9,683,155	21,134,134	22,614,603	21,744,515	57,568,990
Kabupaten Bulungan	21,991,612	3,749,997	21,126,744	17,802,009	11,384,000	42,494,780
Kabupaten Nunukan	4,352,805	2,450,135	15,704,268	16,880,204	16,000,000	26,880,490
Kota Tarakan	2,998,417	6,856,245	16,974,736	86,362,930	23,936,009	57,181,770

LAMPIRAN 4
ANALISIS REGRESI SEDERHANA PENGARUH BD TERHADAP LAJU
PDRB

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Laju PDRB (t)	5.5304	3.96829	155
Belanja Daerah (t-1)	1.5E+08	111955491.3	155

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Belanja Daerah (t-1)		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Laju PDRB (t)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.384 ^a	.147	.142	3.67636	1.893

a. Predictors: (Constant), Belanja Daerah (t-1)

b. Dependent Variable: Laju PDRB (t)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	357.202	1	357.202	26.429	.000 ^a
	Residual	2067.887	153	13.516		
	Total	2425.089	154			

a. Predictors: (Constant), Belanja Daerah (t-1)

b. Dependent Variable: Laju PDRB (t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.482	.496		7.023	.000
	Belanja Daerah (t-1)	1.4E-08	2.6E-09	.384	5.141	.000

a. Dependent Variable: Laju PDRB (t)

LAMPIRAN 5

ANALISIS REGRESI SEDERHANA PENGARUH BD TERHADAP PAD

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PAD (t)	1.5E+07	12488574.20	155
Belanja Daerah (t-1)	1.5E+08	111955491.3	155

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Belanja Daerah (t-1)	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PAD (t)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.485 ^a	.235	.230	10956544.4	1.612

a. Predictors: (Constant), Belanja Daerah (t-1)

b. Dependent Variable: PAD (t)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.65E+15	1	5.652E+15	47.078	.000 ^a
	Residual	1.84E+16	153	1.200E+14		
	Total	2.40E+16	154			

a. Predictors: (Constant), Belanja Daerah (t-1)

b. Dependent Variable: PAD (t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7336038	1477819		4.964	.000
	Belanja Daerah (t-1)	.054	.008	.485	6.861	.000

a. Dependent Variable: PAD (t)

LAMPIRAN 6

ANALISIS REGRESI SEDERHANA PENGARUH LAJU PDRB TERHADAP

PAD

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PAD (t)	1.7E+07	13027017.48	124
Laju PDRB (t-1)	5.3110	3.95209	124

Variables Entered/Removed^d

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Laju ^a PDRB (t-1)	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PAD (t)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.205 ^a	.042	.034	12803079.5	1.459

a. Predictors: (Constant), Laju PDRB (t-1)

b. Dependent Variable: PAD (t)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.75E+14	1	8.754E+14	5.340	.023 ^a
	Residual	2.00E+16	122	1.639E+14		
	Total	2.09E+16	123			

a. Predictors: (Constant), Laju PDRB (t-1)

b. Dependent Variable: PAD (t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.4E+07	1930958		7.121	.000
	Laju PDRB (t-1)	675028.0	292102.2	.205	2.311	.023

a. Dependent Variable: PAD (t)

LAMPIRAN 7

HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS

Correlations

		Belanja Daerah (t-1)	Laju PDRB (t-1)
Belanja Daerah (t-1)	Pearson Correlation	1	.363**
	Sig. (2-tailed)	.	.000
	N	155	124
Laju PDRB (t-1)	Pearson Correlation	.363**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.
	N	124	124

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

LAMPIRAN 8

HASIL UJI HETEROSKEDASITAS 1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.585	.107		5.454	.000
	Belanja Daerah (t-1)	.000	.000	.033	.406	.685

a. Dependent Variable: abse1

LAMPIRAN 9

HASIL UJI HETEROSKEDASITAS 2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.589	.095		6.188	.000
	Belanja Daerah (t-1)	.000	.000	.073	.904	.368

a. Dependent Variable: abse2

LAMPIRAN 10
HASIL UJI HETEROSKEDASITAS 3

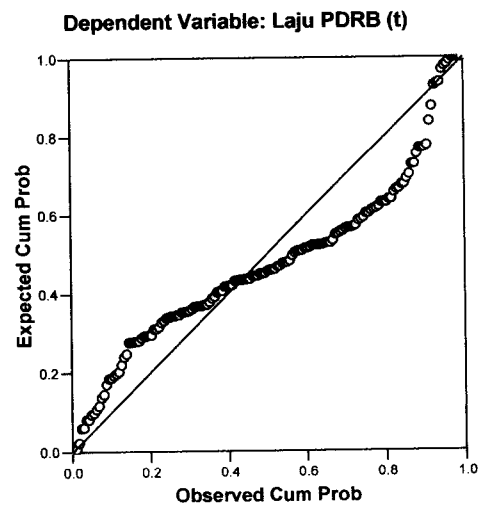
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.732	.108		6.765	.000
	Laju PDRB (t-1)	-.003	.016	-.018	-.200	.842

a. Dependent Variable: abse3

LAMPIRAN 11
HASIL UJI NORMALITAS

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



LAMPIRAN 12
HASIL UJI ANALISIS DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Belanja Daerah (t-1)	155	16028827.00	620853834.00	150542207.084	111955491.3
Laju PDRB (t)	155	-7.09	23.81	5.5304	3.96829
PAD (t)	155	1016058.00	86362930.00	15481859.6065	12488574.20
Valid N (listwise)	155				